

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Konsep Sektor Informal

Konsep sektor informal muncul dalam konsep keterlibatan pakar-pakar internasional dalam perencanaan pembangunan di Dunia Ketiga. Gejala ini muncul setelah kelahiran Negara-negara maju setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada waktu itu muncullah gagasan-gagasan di tingkat internasional maupun nasional untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada Negara-negara dimaksud. Melalui lembaga-lembaga internasional didirikanlah lembaga-lembaga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang seperti The World Bank, International Monetary Found (IMF) dan juga International Labour Organization (ILO). Lembaga-lembaga tersebut melakukan berbagai studi mengusulkan kebijakan dan turut campur tangan dalam pengambilan keputusan menyangkut berbagai bidang yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara berkembang. ILO meluncurkan program untuk World Employment Programme (WEP) yang diterbitkan pada tahun 1972, menggulirkan konsep informal pertama kali yang diperkenalkan di dunia internasional (Chandrakirana 1999).

Jean Breman (1979) *dalam* Manning dan Effendi (1996) mengatakan istilah sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Hart pada tahun 1971 dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja yang tidak terorganisir. Manning dan Effendi (1996) mengemukakan bahwa Keith Hart seorang

antropolog Inggris adalah orang pertama kali melontarkan gagasan sektor informal dalam penelitiannya di suatu kota di Ghana pada tahun 1973.

Kendati telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun sejak dilontarkan konsep sektor informal pada dasawarsa 1970-an hingga saat ini, perdebatan tentang sektor informal masih juga belum mencapai kesepakatan informal sebagai berikut “cara bekerja yang mempunyai ciri-ciri tertentu”. Ciri-ciri yang dimaksud adalah :

- a. Mudah dimasuki,
- b. Pemakaian sumber-sumber daya lokal,
- c. Pemilikan oleh keluarga,
- d. Berskala kecil,
- e. Padat karya dan pemakaian teknologi yang sederhana,
- f. Keterampilan yang dimiliki di luar system pendidikan formal,
- g. Bergerak di pasar yang kompetitif dan tidak berada di bawah pengaturan resmi.

Disamping itu ILO menemukan adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang selalu lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan oleh pemerintahan tetapi mempunyai makna ekonomi karena bersifat kompetitif dan padat karya, memakai input dan teknologi lokal serta beroperasi atas dasar kepemilikan sendiri oleh masyarakat lokal. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian dinobatkan sebagai sektor informal.

Portes dan Catells *dalam* Chandrakirana (1995) mengajukan definisi sektor informal sebagai proses perolehan penghasilan diluar sistem regulasi. Istilah ini merupakan suatu ide akal sehat (*common sense nation*) yang karena batas-batas

sosialnya terus bergeser, tidak dapat dipahami dengan definisi yang ketat. Mereka melihat bahwa sektor informal sebagai suatu proses perolehan penghasilan mempunyai ciri-ciri sentral yaitu tidak diatur oleh lembaga-lembaga sosial dalam suatu lingkungan legal dan sosial. Menurut mereka batas-batas ekonomi informal bervariasi secara substansial sesuai dengan konteks dan kondisi historisnya masing-masing.

Sthurman *dalam* Manning dan Effendi (1996) mengemukakan istilah sektor informal biasanya digunakan untuk mengajukan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Alasan berskala kecil karena :

- a. Umumnya mereka berasal dari klangan miskin,
- b. Sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di Negara berkembang,
- c. Bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk memperoleh keuntungan,
- d. Umumnya mereka berpendidikan sangat rendah,
- e. Mempunyai keterampilan rendah,
- f. Umumnya dilakukan oleh para migran.

Dari ciri-ciri tersebut dapat digambarkan bahwa usaha-usaha itu berupaya menciptakan kesempatan kerja dan memperoleh pendapatan untuk dirinya sendiri. Menurut Sethurman bahwa konseptualisasi sektor informal yang tersebut diatas walaupun bermanfaat tetapi belum dapat memecahkan masalah definisi. Hal ini

karena masih diperlukannya beberapa definisi untuk menentukan batasan sektor ini baik dari sudut pandang operasional maupun penelitian.

Simanjuntak (1995), memberikan ciri-ciri yang tergolong sektor informal sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha umumnya sederhana,
- b. Skala usaha relatif kecil,
- c. Usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin usaha,
- d. Untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada di sektor formal,
- e. Tingkat pendapatan di sektor informal lebih mudah daripada di sektor formal,
- f. Tingkat pendapatan di sektor informal biasanya rendah,
- g. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil.
- h. Usaha-usaha di sektor informal sangat beraneka ragam.

Usaha-usaha sektor informal yang dimaksud diantaranya pedagang kaki lima, pedagang keliling, tukang warung, sebagian tukang cukur, tukang becak, sebagian tukang sepatu, tukang loak serta usaha-rumah tangga seperti : pembuat tempe, pembuat kue, pembuat es mambo, barang-barang anyaman dan lain-lain.

Hans Singer *dalam* Chandrakirana (1995) mengatakan bahwa usaha sektor informal itu seperti jerapah, susah dijelaskan bentuknya tetapi mudah dikenal jika tampak di hadapan mata.

Mazundar *dalam* Manning dan Effendi (1996) memberikan definisi sektor informal sebagai pasaran tenaga kerja yang tidak dilindungi. Dikatakannya bahwa salah satu aspek penting dari perbedaan antara sektor informal dan informal sering

dipengaruhi oleh jam kerja yang tidak tetap dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan kontrak kerja jangka panjang dalam sektor informal dan upah cenderung dihitung per hari atau per jam serta menonjolnya usaha mandiri.

Jan Breman *dalam* Manning dan Effendi (1996), tanpa memberikan batasan istilah yang jelas tetapi membedakan sektor formal dan informal yang menunjuk pada suatu sektor ekonomi masing-masing dengan konsistensi dan dinamika strukturnya sendiri. Sektor formal digunakan dalam pengertian pekerja bergaji atau harian dalam pekerjaan yang permanen meliputi:

- a. Sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan yang merupakan bagian dari suatu struktur pekerjaan yang terjalin dan amat terorganisir.
- b. Pekerjaan secara resmi terdaftar dalam statistik perekonomian,
- c. Syarat-syarat bekerja dilindungi oleh hukum

Kegiatan-kegiatan perekonomian yang memenuhi kriteria ini kemudian dimasukkan dalam istilah sektor informal yaitu suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai kegiatan yang sering kali tercakup dalam istilah umum (Usaha mandiri, 1987)

Wirasarjono *dalam* Didin (1987), mengemukakan cirri-ciri umum sektor informal adalah : Umumnya bekerja tanpa bantuan orang lain atau bekerja dibantu anggota keluarga ataupun buruh tidak tetap yang kebanyakan mereka bekerja dalam jam kerja yang tidak teratur dan jumlah jam kerja di bawah kewajaran, melakukan sembarangan

kegiatan yang tidak sesuai dengan pendidikan atau keahliannya.

Berdasarkan berbagai pendapat dan beberapa penelitian terdahulu dapat disampaikan bahwa konsep sektor informal lebih difokuskan pada aspek-aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya. Aspek ekonomi diantaranya meliputi penggunaan modal yang rendah, pendapatan rendah, skala usaha relatif kecil. Aspek sosial diantaranya meliputi tingkat pendidikan formal rendah berasal dari kalangan ekonomi lemah, umumnya berasal dari migran. Sedangkan dari aspek budaya diantaranya kecenderungan untuk beroperasi diluar sistem regulasi, penggunaan teknologi sederhana, tidak terikat oleh curahan waktu kerja. Dengan demikian cara pandang di atas tentang sektor informal lebih menitik beratkan kepada suatu proses memperoleh penghasilan yang dinamis dan bersifat kompleks. Di samping aspek-aspek di atas, kehadiran sektor informal dapat dilihat dari dua segi yaitu segi positif dan segi negatif. Segi positif diantaranya mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, kemampuan menyerap angkatan kerja yang sekaligus sebagai katub pengaman terhadap pengangguran dan kerawanan sosial, menyediakan kebutuhan bahan pokok untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan dari segi negatifnya adalah mengganggu lalu-lintas, mengganggu keindahan kota dan mengganggu kebersihan.

Berdasarkan berbagai pendapat seperti telah diuraikan di atas, maka ciri-ciri kegiatan sektor informal dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Manajemennya sederhana,
- b. Tidak memerlukan izin usaha,
- c. Modal rendah,

- d. Padat karya,
- e. Tingkat produktivitas rendah,
- f. Tingkat pendidikan formal biasanya rendah,
- g. Penggunaan teknologi sederhana,
- h. Sebagian besar pekerja adalah keluarga dan pemilikan usaha oleh keluarga,
- i. Mudah nya keluar masuk usaha,
- j. Kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah.

## **2.2. Sektor Informal dan Penyerapan Angkatan Kerja**

Timbulnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional yaitu perekonomian pedesaan yang sebagian besar didasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam sederhana. Karena rendahnya upah tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin langkanya lahan-lahan pertanian di pedesaan, maka banyak tenaga kerja yang memilih alternatif lain untuk urbanisasi dan bekerja di sektor non pertanian.

Berdasarkan hasil suatu penelitian (Cahyono, 1983) disimpulkan bahwa dari Proporsi proporsi tenaga kerja yang mencari nafkah di berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi, ternyata dari tahun ke tahun penyediaan kesempatan kerja sektor pertanian semakin menurun, sedangkan pada sektor non pertanian menunjukkan kenaikan. Dalam hubungan ini ternyata sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor informal. Angkatan kerja yang merupakan bagian dari tenaga kerja dimana tenaga kerja itu sendiri mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti

bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985). Dengan demikian tidak semua penduduk dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja, sebab diantara penduduk tersebut ada yang kurang mampu memproduksi barang atau jasa misalnya anak-anak di bawah usia kerja, orang yang lanjut usia atau jompo.

Secara praktis pengertian tenaga kerja biasanya hanya dilihat dari segi umur dengan melihat batas umur, maka secara praktis pula dapat ditentukan golongan tenaga kerja dan golongan bukan tenaga kerja. Di tiap-tiap Negara batas umur tenaga kerja ini tidak sama. Di Indonesia dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum (Simanjuntak, 1985). Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka keseluruhan penduduk apabila dilihat dari sudut ketenagakerjaan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu : penduduk usia kerja (*working age population*) dan penduduk di luar usia kerja (*non working age population*). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga kerja berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. Secara ekonomis tidak semua tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan produktif. Hanya sebagian dari mereka yang sesungguhnya terlibat, sedangkan sebagian lainnya tidak terlibat. Mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan yang produktif disebut bukan angkatan kerja (*non in the labour force*). Sedangkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan atau usaha produktif disebut angkatan kerja (*labour force*).

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang sedang mencari kerja atau menganggur. Golongan yang bekerja yaitu orang-orang yang sudah aktif dalam kegiatannya dalam proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan golongan yang sedang mencari kerja atau orang yang menawarkan

jasa tenaga atau pikiran untuk proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Jumlah orang yang dapat terserap dalam suatu pekerjaan tergantung dari besarnya permintaan (demand) dalam masyarakat. Sedangkan besar kecilnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun tingkat upah.

Permintaan tenaga kerja ini dapat ditinjau dari sektor formal maupun sektor informal. Sektor informal yang umumnya dipandang sebagai pekerjaan yang inferior, ternyata mempunyai banyak bidang usaha. Satu diantaranya adalah bidang usaha perdagangan dan salah satu pelaku di bidang perdagangan ini adalah pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima dalam usahanya mempunyai beberapa karakteristik pasar diantaranya yaitu: pasar tidak terorganisir dengan baik, umumnya tidak memiliki izin usaha, lokasi pasar tidak permanen dan waktu yang digunakan untuk usaha tidak teratur. Beberapa karakteristik ini dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk memasuki kerja (terserap) oleh sektor informal. Oleh karenanya kaitan antara sektor informal dan penyerapan angkatan kerja dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Persyaratan Masuk.

Angkatan kerja mudah terserap pada sektor informal, alasan ini karena sektor informal memberikan kebebasan masuk maupun keluar kerja kepada angkatan kerja tanpa adanya persyaratan-persyaratan seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Akibatnya bagi angkatan kerja yang berminat/tertarik untuk memasuki

kerja di sektor informal langsung dapat terserap sesuai dengan jenis yang diminati.

b. Waktu kerja.

Dari segi waktu kerja sektor ini memberikan kebebasan waktu kepada angkatan kerja. Dengan adanya kebebasan waktu kerja ini angkatan kerja akan lebih fleksibel untuk menjalankan usahanya sehingga bagi siapapun yang memasuki sektor ini dapat memilih waktu yang diinginkan.

c. Umur.

Secara relatif bekerja pada sektor informal tidak batas umur yang mengikat seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Secara relatif bekerja di sektor informal tidak ada istilah usia produktif atau non produktif. Siapapun yang berminat memasuki sektor ini dalam usia berapapun dapat membuka dan menjalankan usahanya. Dari gambaran ini bagi angkatan kerja yang sudah tidak dipekerjakan di sektor formal (dipensiunkan misalnya) dan masih berminat untuk bekerja maka dapat terserap pada sektor informal.

d. Jenjang pendidikan.

Seperti disebutkan dimuka bahwa sektor informal umumnya dipandang sebagai pekerjaan yang inferior, maka bagi angkatan kerja yang mempunyai pendidikan formal terbatas (rendah) apalagi hanya buta huruf, tentunya akan sulit memasuki kerja di sektor formal. Oleh karena itu sektor informal menawarkan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang berminat memasukinya. Dengan tertampungnya angkatan kerja memasuki sektor ini, mereka dapat dikatakan telah terserap pada

sektor informal.

Menggarisbawahi keunggulan-keunggulan sektor informal seperti yang disebutkan di atas, maka keberadaan sektor informal jangan hanya dipandang sebagai hal yang negatif saja tetapi termasuk segi positifnya juga. Dari segi positifnya sektor informal mempunyai dampak sebagai berikut :

- a) Mempunyai daya kemampuan untuk menyerap angkatan kerja. Hal ini mengingat keterbatasan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja.
- b) Mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Sektor informal yang selama ini bagi sebagian orang dianggapnya lebih sering sebagai beban yang mencemari keindahan dan ketertiban kota, bahkan kadangkala mereka dijadikan buronan pihak Satpol PP (ketertiban umum). Walaupun terdapat dampak negatif, tetapi tidaklah berarti sektor ini "*harus dimusuhi*" tetapi justru perlu dilindungi, dibangun, dikembangkan/dibina sehingga dampak negatif bisa dihilangkan.

Sektor informal seharusnya dijadikan kelompok sasaran (*target groups*) karena sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa bantuan pemerintah. Sektor ini telah memberi andil dan ikut berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Bahkan dalam situasi kelesuan ekonomi sektor informal dapat berfungsi sebagai katub pengaman (Simanjuntak, 1985).

Dalam rangka mengemban misi pemerataan pembangunan di era otonomi daerah, maka sudah selayaknya bilamana kebijakan-kebijakan ekonomi dalam rangka

pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pertumbuhannya dirangsang dari “bawah” khususnya yang bergerak di sektor industri kecil di pedesaan dan sektor informal di perkotaan. Sektor informal di perkotaan telah terbukti dapat terus langgeng, bahkanmeningkat walaupun kadangkala di kejar-kejar oleh aparat ketertiban. Berarti sektor informal tidak dapat dihapuskan. Sebaliknya sektor informal perlu dibina dan diarahkan karena ternyata di sisi lain sektor informal juga membayar redistribusi yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, yang selanjutnya dana tersebut dapat diputar kembali untuk pembiayaan pembangunan.

Proses pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan merupakan modal dasar pembangunan. Untuk mewujudkannya adalah melalui jalur pendidikan, baik jalur formal, maupun non formal, dalam usaha untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, keahlian agar mampu bekerja secara produktif, efisien dan efektif.

Todaro (1998) menyebutkan di negara-negara yang sedang membangun ssebagian besar penduduknya berada di sektor pertanian dengan demikian pertambahan terbesar terjadi di sektor tersebut. Oleh karena itu sebagian dari pertambahan penduduk tersebut pindah ke kota-kota akan menambah masalah pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung di kota-kota. Banyak pandangan telah disampaikan sebagai usaha untuk menggambarkan kesenjangan pasar antara tenaga kerja di negara agraris dan miskin melalui pendekatan angkatan kerja terhadap masalah pengangguran. Pandangan yang utama tampak terjadi di Indonesia. Orang-orang miskin yang tidak menerima subsidi dari pemerintah tidak

selalu menjadi penganggur, dan banyak diantara mereka yang berusaha mencari nafkah melalui usaha sendiri dengan modal kecil, atau tanpa modal sama sekali.

### **2.3. Pekerja Anak**

Secara umum status pekerja anak dikelompokkan kepada sektor formal dan informal, sektor formal merupakan istilah pekerjaan untuk jenis pekerjaan yang terkait dengan kontrak kerja sebagai karyawan dan buruh dalam satu badan atau perusahaan dengan upah dari pengusaha. Sedangkan untuk kategori pekerja informal adalah pekerjaan yang tidak terkait secara jelas dalam kontrak kerja, akan tetapi hanya berupa kesepakatan kerja.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak). Anak itu sendiri bisa anak kandung, anak angkat atau anak asuh. Bekerjanya anak-anak dibawah umur menyebabkan adanya kesempatan lain yang hilang, seperti pendidikan yang merupakan kepaerluan utama mereka. Mereka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan bersekolah karena berbagai factor. Menurut Farid (1998), makin lama anak hidup di jalan, maka semakin susah mereka meninggalkan dunia dan kehidupan jalanan itu.

Kesejahteraan anak suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani (spiritual dan moral), mental, dan sosial untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas (UU No.4/tentang Kesejahteraan Anak).

Menurut Sagis (1982) pendidikan adalah merupakan sumber penggerak pembangunan dimasa mendatang, oleh karena itu produk pendidikan itu sewajarnya:

- a. Bebas dari rasa takut menghadapi masa depan.
- b. Bebas dari rasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesempatan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan akan sarana angkutan umum, listrik dan air bersih.
- c. Bebas dari rasa takut untuk mengemukakan pendapat dan berbeda pendapat dengan disertai rasa tanggung jawab.
- d. Bebas dari rasa ketergantungan pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e. Bebas dari rasa diperlakukan dengan tidak adil

Manusia yang utuh dalam arti bebas dari rasa takut menghadapi masa depannya, bebas dari rasa takut akan kekurangan kebutuhan hidupnya hanya mungkin dapat dicapai oleh manusia yang memperoleh kesempatan kerja yang menjamin kehidupan yang layak dari hasil imbal jasanya.

Bebas dari rasa rendah diri dan bebas dari rasa ketergantungan pada orang lain, hanya mungkin tercipta diri manusia mandiri, penuh kepercayaan akan kemampuan diri pribadi, karena didukung oleh kemampuan profesionalisme. Dengan kemampuan profesionalisme, manusia akan mampu untuk meningkatkan mutu hasil karyanya secara terus-menerus, sehingga akan menjadi kekuatan bagi kemajuan selanjutnya.

Pembinaan profesionalisme adalah melalui jalur pendidikan dan latihan atau Human Investment, yang dalam World Bank Report (1980) diantaranya dikemukakan *The case for human development is not only or even primality an economic eno, less hanger, fewer child deaths, and better chane of primary education are almost Universally accepted as important and in then selves.*

Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena hal itu berkaitan dengan pembentukan modal manusia, dimana berhubungan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suat sumber yang kreatif dan produktif (Herbison, 1988).

Saat ini telah disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tergantung pada pembentukan modal manusia, yaitu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu Negara (Herbison, 1988).

Schult (1961) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat di Amerika adalah berkaitan dengan pembiayaan pendidikan yang secara relative selalu meningkat. Studinya mengatakan bahwa pada pendidikan membawa kenaikan yang lebih besar pada Pendapatan Nasional. Demikian pula *Vablen*, pengetahuan dan keterampilan teknologi merupakan peralatan immaterial atau asset tidak nyata masyarakat. Tanpa itu modal fisik tida dapat dimanfaatkan secara produktif.

Langkah investasinya pada modal manusia merupakan penyebab lambannya pertumbuhan Negara berkembang. Tanpa mengembangkan pendidikan, pengetahuan

dan keterampilan serta meningkatkan tingkat keterampilan dan efisiensi fisik rakyat, maka produktivitas modal fisik akan lamban. Pada umumnya negara berkembang menghadapi kekurangan keterampilan kritis yang dibutuhkan bagi sector industri dan mempunyai supply tenaga kerja yang berlebih. Kelebihan tenaga kerja ini disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kurang terkendali, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi.

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah keternagakerjaan, salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia terampil dan produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mampu mengatasi masalah kemiskinan. Adelman dan Morris (1973) maupun Galbraith (1979) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan langkah paling strategis dalam usaha mengatasi kemiskinan. Sikap ini terlihat pula dalam Repelita IV Indonesia, sehingga tidak mengherankan apabila sekitar 5% dari Anggaran Pembelanjaan Negara selama Repelita IV digunakan untuk meningkatkan usah-usaha pendidikan.

Disadari pula bahwa indikator kesejahteraan harus mendapat perhatian khusus. Hal ini dikemukakan oleh *Development Council (ODC) dalam (Moris David, 1979)* dengan mengintrodusir *Pshysical Quality of Life Index (PQLI)*, antara lain:

- a. Tingkat kematian bayi (*infent mortality*).
- b. Harapan hidup pada bayi berusia 1 tahun (*Life expectancy at age one*).
- c. Tingkat melek aksara (*basic Liberacy*)

PQLI sama sekali tidak bermaksud untuk mengukur usaha-usaha pembangunan, sebaliknya indeks ini bertujuan untuk mengukur cirri-ciri kemampuan hidup dikalangan masyarakat. Untuk menggambarkan keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indicator seperti partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka buta huruf.

Tingkat melek aksara tergantung dari kemampuan untuk memperoleh kesempatan belajar. Yang berarti pendidikan itu merupakan varieabel yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kenaikan jenjang pendiadikan ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar ddi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. ( Esmara,1980)

Schiller (1973) mengatakan, ada tiga alasan utama mengapa jenjang pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibat dari pertanbahan pengetahuan dan keterampilan.

- b. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan terbuka kesempatan kerja yang lebih luas.
- c. Lembaga-lembaga pendidikan dalam hal-hal tertentu dapat berfungsi selaku badan penyalur tenaga kerja.

Ini berarti mereka yang berpendidikan tinggi akan mendapat perlakuan yang istimewa dalam pasar tenaga kerja. Namun demikian untuk memperoleh pendidikan tersebut, diperlukan investasi yang tidak sedikit jumlahnya. Disinilah terletak kelemahan utama dari penduduk golongan miskin.

Disatu pihak sebahagian besar penduduk menjadi miskin karena pendidikannya rendah, sebaliknya dilain pihak tingkat pendidikan golongan tersebut rendah karena dalam keadaan miskin. Ini berarti golongan penduduk miskin seakan-akan terperangkap dalam jebakan kemiskinan.

Dari hal tersebut diatas ternyata ada hubungan antara pendidikan dengan penghasilan keluarga atau ekonomi keluarga. Tetapi amat disayangkan bahwa, ada kecenderungan masyarakat, baik di Kota maupun di pedesaan memanfaatkan anak-anak usia sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Padahal dengan memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak mereka berarti mengantarkan anaknya memiliki suatu pengetahuan. Menurut Schummacher (1979) bahwa pendidikan adalah sumber penggerak terbesar kehidupan.

Hal ini terjadi karena ketidak mampuan keluarga untuk memberikan biaya pendidikan, justru sebaliknya anak usia sekolah dasar membantu ekonomi keluarga.